

Strategi Ekonomi Islam Untuk Pembangunan Sistem Ekonomi Pancasila di Desa Sukawijaya Tambelang Bekasi

(Islamic Economic Strategy for the Development of the Pancasila Economic System in Sukawijaya Village, Tambelang, Bekasi)

Oleh:

Syaiful Bachri; Adam Lubis; Kriswanta; Supriyanto

Magister Manajemen Universitas Pelita Bangsa

syaifulbachri30@gmail.com; adam.lubis01@gmail.com; kriswantasimon@yahoo.co.id;

supriyanto@pelitabangsa.ac.id

ABSTRAK

Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan kesepakatan politik sebagai aturan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam merumuskan suatu strategi. Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan segala bidang, tak terkecuali sistem ekonomi, kebijakan ekonomi, strategi manajemen, maupun sosial kemasyarakatan dalam suatu daerah. Namun persaingan disemua bidang ini menimbulkan suatu permasalahan maupun tantangan bagi ekonomi kerakyatan yang mengandung nilai-nilai Pancasila untuk memperluas kedaulatannya sehingga berdampak dan berpengaruh terhadap ekonomi pedesaan yang masih menganut kepercayaan yang religius atau islami. Oleh karena itu, masyarakat ekonomi kerakyatan perlu mempunyai strategi nyata dari sila pertama “ketuhanan Yang Maha Esa” untuk mendorong terciptanya suatu tatanan perekonomian Pancasila yang mempunyai pandangan dalam pembangunan ekonomi sebagai hasil usaha bersama untuk dapat menciptakan terwujudnya nilai – nilai Ketuhanan YME. Strategi ini berupaya menerapkan ekonomi islam dengan mewujudkan suatu demokrasi ekonomi sebagai bentuk ekonomi sosialis religius. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan strategi manajemen perekonomian berbasis islami dengan sistem ekonomi Pancasila dalam suatu lingkup desa dan implementasi Pancasila pada sila pertama sebagai suatu strategi upaya mewujudkan perekonomian mensejahterakan rakyat di Desa Sukawijaya Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi. Keadaan perekonomian disuatu pedesaan biasanya berdasarkan kepercayaan turun temurun dari keluarga maupun masyarakat sekitar melalui pembelajaran agama, sehingga masyarakat perlu menerapkan strategi yang bisa bersinergi dengan Sistem ekonomi Pancasila. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan norma dan teori yang dikaji untuk memecahkan masalah sistem ekonomi Pancasila yang ada di masyarakat desa Sukawijaya Kecamatan Tambelang, yaitu dengan menganalisis strategi ekonomi religius atau islami dengan nilai-nilai Pancasila yang di lihat dari Sistem Ekonomi kerakyatan untuk dipakai sebagai upaya mensejahterakan rakyat di desa Sukawijaya Kecamatan Tambelang.

Kata kunci:

Strategi Ekonomi Islam, Sistem Ekonomi Pancasila

ABSTRACT

Pancasila as a national ideology is a political agreement as the basic rule of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) in formulating a strategy. Pancasila as the basis of the state becomes the basis of all fields, including the economic system, economic policy, management strategy, and social community in an area. However, competition in all these fields poses a problem as well as a challenge for the people's economy which contains the values of Pancasila to expand its sovereignty so that it has

an impact and influence on the rural economy which still adheres to religious or Islamic beliefs. Therefore, the populist economic community needs to have a real strategy from the first principle of "God Almighty" to encourage the creation of a Pancasila economic order that has a view in economic development as a result of joint efforts to be able to create the realization of the values of God Almighty. This strategy seeks to implement Islamic economics by realizing an economic democracy as a form of religious socialist economy. This study aims to determine the implementation of an Islamic-based economic management strategy with the Pancasila economic system within a village scope and the implementation of Pancasila in the first precepts as a strategy for realizing the economy for the welfare of the people in Sukawijaya Village, Tambelang District, Bekasi Regency. The economic situation in a rural area is usually based on hereditary beliefs from the family and the surrounding community through religious learning, so that people need to implement strategies that can synergize with the Pancasila economic system. This study uses a qualitative analysis with a normative and theoretical approach that is studied to solve the problem of the Pancasila economic system that exists in the Sukawijaya village community, Tambelang District, namely by analyzing religious or Islamic economic strategies with Pancasila values seen from the People's Economic System to be used as Efforts to prosper the people in Sukawijaya village, Tambelang district.

Keywords:

Islamic Economic Strategy, Pancasila Economic System

Pendahuluan

Strategi adalah sejumlah keputusan dan aksi yang ditujukan untuk mencapai tujuan (goal) dalam menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan industrinya. Siagian P. Sondang menyatakan bahwa strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan sadar yang dibuat oleh manajemen puncak dan di implementasikan oleh seluruh jajaran dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut.

Kata "strategi" dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti yaitu:

- a. ilmu dan seni mengembangkan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai.
- b. Ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam kondisi perang atau dalam kondisi yang menguntungkan.
- c. Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.

Strategi dalam perekonomian religius atau Islami adalah strategi ekonomi tersendiri, bukan merupakan perpaduan dan atau campuran antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Strategi ekonomi Islam menempatkan manusia bukanlah sebagai sentral (anthroposentrism) tetapi sebagai hamba Tuhan (abid) yang harus mengabdikan dan mengemban tugas yang dipercayakan-Nya sebagai hamba (khalifah). Untuk itu, dalam kegiatan ekonomi harus menjunjung tinggi nilai-nilai kepemilikan, nilai-nilai keadilan, kebebasan, keseimbangan, dan persaudaraan serta kebersamaan sesuai dengan tuntunan ajaran agama agar tercipta sebuah tatanan hidup pribadi dan bermasyarakat serta bernegara yang baik. Untuk itu, Islam telah meletakkan basis-basis kebijakannya berupa:

- a. perintah membayar zakat kepada orang-orang yang mampu untuk para mustahiq;
- b. melarang praktik-praktik riba (eksploitasi);
- c. memberikan jaminan sosial kepada orang yang berhak menerimanya;
- d. mendorong terciptanya kerjasama ekonomi tidak hanya antara individu dengan individu atau masyarakat dengan masyarakat lainnya tetapi juga kerjasama antar negara;

- e. memfungsikan lembaga pemerintah untuk menjadi polisi sehingga sinergi para pelaku pasar akan dapat mewujudkan dan menciptakan kemakmuran, keamanan, dan keadilan di tengah-tengah masyarakat

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kata "strategi" yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala upaya atau rencana cermat yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat maupun seluruh pihak terkait dalam mencapai sasaran khusus, yaitu sistem ekonomi yang berdasarkan sila pertama dengan adanya 3 unsur strategi yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian hasil atau evaluasi untuk meningkatkan Kualitas ekonomi religius dalam masyarakat desa Sukawijaya kecamatan Tambelang.

Era reformasi yang sudah berjalan pada tahun 1998, membawa perubahan dalam sistem demokrasi dimana negara Indonesia mengawali tonggak sejarah baru yang terus bergulir ke dalam babak baru ke sebuah masa yang penuh kebebasan dalam menganut dan mengungkapkan suatu pandangan politik, namun sayangnya kebebasan itu berdampak pada penurunan pamor Pancasila, sehingga menjadikan sebuah alasan penulis untuk menyampaikan keprihatinannya terhadap merebaknya pandangan politik sektarian ditengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Lebih dari itu Pancasila dianggap tidak menjawab apa yang menjadi relevansinya terhadap tantangan ke depan, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa.

Kita dianugerahi oleh pendiri Negara Indonesia yang telah mewariskan fondasi keIndonesiaan yang telah teruji yakni Pancasila. Sebagai bukti bahwa Pancasila mampu tetap menjadi perekat maupun penyatu bangsa yaitu dengan pergantian kekuasaan dari periode ke periode hingga saat ini telah terjadi beberapa kali pergantian kepemimpinan yang ada di bangsa ini, tetapi Bangsa Indonesia tetap masih bersatu, sama halnya dengan apa yang terjadi di masa-masa krisis yang lalu, Pancasila selalu hadir sebagai solusi kebangsaan

Sukarno menyebut pertama kali dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 dihadapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pancasila merupakan keyakinan pokok dan penuh dari Bung Karno bahwa suatu negara Indonesia yang berdaulat dapat bertahan hanya apabila ia dibangun atas dasar yang dapat diterima oleh semua golongan, politik, dan agama.

Sangat disesalkan mengingat sampai sekarang, belum terlihat jelas upaya mewujudkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila secara sungguh-sungguh dan tidak pernah sepenuh hati dilaksanakan secara konkret. Jangankan dilaksanakan dengan kesungguhan, keinginan membicarakannya saja cenderung ditinggalkan belakangan ini, Pancasila terkesan seperti ditelantarkan. Eksistensi negara-bangsa Indonesia yang pluralistik terancam tamat jika dasar negara dan konstitusi tidak dijadikan ukuran dan acuan dalam berpikir serta berperilaku sebagai warga negara.

Ekonomi Indonesia pada masa rezim Orde Baru lebih dikenal dengan nama Ekonomi Pancasila namun karena Ekonomi Pancasila itu lekat hubungannya dengan Orde Baru sehingga pasca masa Reformasi para pakar lebih elegan menyebutnya sebagai Ekonomi Kerakyatan. Namun dalam perjalanannya Ekonomi Kerakyatan tidak pernah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang di cita-citakan oleh Pancasila

Visi "Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur" merupakan gagasan besar dan komitmen penyelenggara negara dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, kuat, mandiri, modern, berkeadilan dan berkeadaban serta berkesejahteraan. Visi ini merupakan kerangka dasar dan strategis dalam menjabarkan tujuan negara yang telah dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 "...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,..". Komitmen ini, secara normatif telah dinyatakan dalam Pasal 33 UUD 1945, sehingga secara konstitusional menjadi

dasar dan rujukan dalam menetapkan arah kebijakan di bidang pembangunan ekonomi yang oleh Jimly disebut sebagai konstitusi ekonomi.

Secara historis konsep ekonomi kerakyatan merupakan gagasan di bidang ekonomi yang dikembangkan oleh Soekarno dan Hatta pada tahun 1930-an. Soekarno menggunakan istilah ekonomi rakyat yang berhadapan dengan sistem ekonomi monopoli, sedangkan Mohammad Hatta menggunakan istilah perekonomian ra'jat dan ekonomi ra'jat merujuk pada pemahaman tentang grass-roots economy atau ekonomi berbasis rakyat (people-based economy) dan ekonomi terpusat pada kepentingan rakyat (people-centered economy). Latar belakang tulisan Mohammad Hatta pada era 1931 sampai dengan 1934 di atas didorong keprihatinan beliau dengan politik cultuurstelsel yang diterapkan Belanda, dimana kebijakan perekonomian tidak berpusat pada kepentingan rakyat dimaksud. Oleh karena itu, tatkala Mohammad Hatta menyusun konsep ekonomi rakyat atau ekonomi pancasila tidak boleh ditafsirkan lepas dari penderitaan dan kesengsaraan rakyat, yaitu harus mampu melakukan pemberdayaan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, konsep ekonomi kerakyatan tidak bisa dipisahkan dengan konsep kesejahteraan rakyat.

Istilah Ekonomi Pancasila baru muncul pada tahun 1967 dalam suatu artikel Dr. Emil Salim. Ketika itu belum begitu jelas apa yang dimaksud dengan istilah itu. Istilah itu menjadi lebih jelas ketika pada tahun 1979, Emil Salim membahas kembali yang dimaksud dengan Ekonomi Pancasila. Pada pokoknya Ekonomi Pancasila adalah suatu konsep kebijaksanaan ekonomi, setelah mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan, hingga mencapai titik keseimbangan. Kekanan artinya bebas mengikuti aturan pasar, sedangkan ke kiri artinya mengalami intervensi negara dalam bentuk perencanaan memusat.

Ruh tata ekonomi usaha bersama yang berasas kekeluargaan adalah tata ekonomi yang memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk berpartisipasi sebagai pelaku ekonomi. Tata ekonomi yang seharusnya dibangun adalah bukan tata ekonomi yang monopoli atau monopsoni atau oligopoli. Tata ekonomi yang dituntut nilai Pancasila adalah tata ekonomi yang memberi peluang kepada seluruh rakyat atau warga negara untuk memiliki aset dalam ekonomi nasional maupun regional. Tata ekonomi nasional adalah tata ekonomi yang membedakan secara tegas barang dan jasa mana yang harus diproduksi oleh pemerintah dan barang dan jasa mana yang harus diproduksi oleh sektor privat atau sektor non pemerintah sehingga semua masyarakat terdampak positif akan sistem ekonomi tersebut.

Masalah ekonomi yang belum berdasarkan nilai – nilai sila pertama Pancasila memang menjadi masalah pembangunan daerah di pedesaan maupun nasional begitu juga di daerah peneliti tinggal yaitu di Kp. Pulumurub Ds Sukawijaya Kec. Tambelang Kabupaten Bekasi dalam penerapan strategi ekonomi islam untuk pembangunan sistem Ekonomi Kerakyatan (Ekonomi Pancasila) di pedesaan secara cakupan mikro.

Sebenarnya Kabupaten Bekasi umumnya mempunyai banyak potensi yang dapat dikembangkan secara maksimal seperti kondisi wilayah yang bervariasi yaitu pesisir pantai, dataran rendah serta dataran tinggi. Masing-masing wilayah ini pastinya mempunyai komoditas ekonomi yang beragam yaitu wisata pantai dan hasil laut didaerah pesisir, pusat perdagangan dan pusat perkotaan baik itu wilayah industri maupun wilayah pedesaan dengan hamparan persawahan didaerah dataran rendah serta hasil perkebunan dan wisata alam didaerah dataran tinggi maupun wisata religius. Seharusnya ini menjadi modal penting dalam perluasan lapangan pekerjaan serta sistem perekonomian kepancasilaan dimasing-masing wilayah yang tentunya perlu didukung penuh oleh pemerintah daerah serta peran masyarakat di daerah tersebut.

Penulis melihat di Kp. Pulumurub Ds Sukawijaya Kec. Tambelang Kab. Bekasi terdapat beberapa hal yang perlu didukung yaitu kebijakan pengendalian penggunaan lahan, peningkatan kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah, memperkokoh kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan

terhadap masyarakat, meningkatkan kapasitas aparat desa, mendorong peran serta masyarakat melalui lembaga-lembaga pelayanan dalam berbagai bidang (lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, penyuluhan, layanan sosial dll), pemetaan sumberdaya manusia dengan menerapkan sistem informasi kependudukan dengan berbagai macam atributnya, perluasan dan pendayagunaan teknologi. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Seberapa Penting Strategi Ekonomi Islam dalam kehidupan Bermasyarakat?
2. Apakah tepat Strategi Ekonomi Islam dikombinasikan dengan sistem ekonomi Pancasila?
3. Bagaimana penerapan nilai sila pertama Pancasila dalam pembangunan sistem Ekonomi Kerakyatan (Ekonomi Pancasila) di desa Sukawijaya kec, Tambelang?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Penelitian kualitatif mengutamakan makna, makna yang diungkap berkisar pada persepsi orang mengenai suatu peristiwa. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif. penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara menggambarkan secara jelas (deskripsi). Data deskriptif yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian kualitatif memerlukan ketajaman secara analisis, objektivitas, sistematis, dan sistemik sehingga diperoleh ketepatan dalam interpretasi, sebab hakikat dari suatu fenomena atau gejala penganut penelitian kualitatif adalah totalitas atau gestalt. Diperlukan pertimbangan peneliti dalam penggunaan dan penafsiran makna yang terkandung dalam fenomena. Penelitian ini menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi untuk pembangunan sistem Ekonomi Kerakyatan (Ekonomi Pancasila) di pedesaan dalam hal gotong royong dalam perwujudan Persatuan Indonesia. Pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Hasil Penelitian

A. Peran Penting Strategi Ekonomi Islam dalam kehidupan Bermasyarakat.

Nilai-nilai dasar sebuah strategi perekonomian terdapat basis kebijakan (nilai instrumental) yang mendukung. Dalam strategi ekonomi kapitalis, nilai instrumental tersebut terletak pada nilai persaingan sempurna dan kebebasan keluar masuk pasar tanpa restriksi, informasi, dan bentuk pasar atomistik dari tiap unit ekonomi, pasar yang monopolistik untuk mencegah perang harga dan pada waktu yang sama menjamin produsen dengan kemampuan untuk menetapkan harga lebih tinggi dari pada biaya marginal. Dalam strategi ekonomi Islam ada beberapa nilai instrumental yang strategis yang mempengaruhi tingkah laku ekonomi seseorang, masyarakat, dan pembangunan ekonomi pada umumnya.

Pertama, zakat. Zakat merupakan bagian dari harta yang harus dikeluarkan oleh seorang Muslim bila harta mereka telah mencapai nisab dan sudah memenuhi ketentuan- ketentuan yang ditetapkan oleh syariah, yang ukuran dan peruntukannya juga sudah ada ketetapan dari Tuhan sendiri. Pada masa awal Islam zakat dihimpun oleh negara dan merupakan sumber pendapatan utama negara. Zakat pada waktu itu benar-benar merupakan sarana utama untuk

menciptakan keadilan sosial, politik, dan ekonomi. Aktivitas ini benar-benar berfungsi menciptakan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat, karena dana zakat merupakan salah satu pilar penting dari sumber dana jaminan sosial. Adanya strategi kebijakan ini secara ekonomi tentu memiliki beberapa makna, yakni:

- a. zakat mendorong terjadinya pendistribusian pendapatan dan kekayaan dari orang yang mempunyai kepada orang yang miskin atau kesenjangan ekonomi bisa dikurangi;
- b. zakat secara langsung atau tidak tentu akan mempunyai pengaruh nyata terhadap tingkah laku konsumsi umat dan penciptaan lapangan kerja apalagi bila zakat tersebut dikelola melalui usaha-usaha produktif sehingga secara sosial, zakat dapat memberikan dampak bagi terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas yang diakibatkan oleh perbedaan pendapatan yang tajam;
- c. zakat dapat meningkatkan produktivitas dan daya beli masyarakat dan serta membendung inflasi.

Kedua, pelarangan riba. Strategi kebijakan ini sangat terkait erat dengan pemberantasan praktik kezaliman dan ketidakadilan. Secara sempit penghapusan riba berarti penghapusan eksploitasi yang terjadi dalam utang-piutang maupun jual-beli (tetapi), secara luas penghapusan riba dimaknai sebagai penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. Secara ekonomi, praktik riba jelas tampak tidak berpihak kepada full employment (terciptanya tenaga kerja penuh) karena sistem riba atau bunga jelas tidak memberi peluang kepada nasabah untuk masuk ke sektor-sektor usaha yang tingkat profitnya sama atau di bawah dari suku bunga yang ada. Akibatnya, peluang lapangan kerja menjadi tertutup dan rekrutmen terhadap tenaga kerja menjadi tidak bisa dilakukan. Praktik ini diperparah oleh perbankan konvensional yang tidak mau mengambil risiko rugi sehingga mereka meminta jaminan kepada para nasabahnya. Strategi Kebijakan ini dapat diterapkan kepada kaum yang mempunyai karena merekalah yang memiliki jaminan. Sementara itu, orang yang miskin meskipun secara teknis mereka lebih layak untuk mendapatkan kredit karena keahlian dan kemampuan yang dimilikinya. Namun, karena mereka tidak memiliki apa-apa untuk dijamin, maka mereka tidak bisa mendapatkannya. Hal ini akan berdampak kepada produktivitas dan efisiensi. Sistem riba ini secara makro akan meningkatkan inflasi, karena tingkat suku bunga yang dikenakan kepada nasabah jelas akan meningkatkan biaya produksi sehingga secara keseluruhan harga akan naik (inflasi). Bila harga-harga secara umum meningkat, maka pasti ada kelompok masyarakat yang terpukul dan akan terkena dampak negatif dari inflasi tersebut yaitu orang yang berpendapatan rendah sehingga tidak mustahil mereka yang semula sebagai muzaki akan jatuh miskin. Hal ini disebabkan terjadinya kenaikan harga-harga yang menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.

Ketiga, kerjasama ekonomi. Kalau dalam ekonomi kapitalis sangat ditonjolkan masalah kompetisi bebas, sehingga mereka melihat orang lain sebagai kompetitor atau pesaing yang harus ditundukkan. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis terjadi sebaliknya. Sistem ini tidak mengenal persaingan karena segala-galanya sudah diatur oleh negara baik di tingkat produksi, distribusi maupun konsumsi. Tetapi berbeda dengan kedua sistem ekonomi di atas, sistem ekonomi Islam sangat dianjurkan adanya kerjasama dalam semua tingkat kegiatan ekonomi baik pada sektor produksi maupun distribusi dan konsumsi. Kerjasama tersebut bisa dilakukan dalam bentuk syirkah, mudharabah, dan atau koperasi yang fungsinya, menurut Daud Ali, akan dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, mencegah kesengsaraan sosial, mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata, dan melindungi kepentingan ekonomi lemah. Dengan adanya kerjasama ini maka prinsip yang kuat membantu yang lemah dan adanya pembagian kerja dan

spesialisasi tentu bisa ditegakkan sehingga kebersamaan, keadilan, dan pertumbuhan serta pemerataan akan dapat diwujudkan.

Keempat, jaminan sosial. Islam memberikan jaminan terhadap tingkat dan kualitas hidup yang minimum (basic needs) bagi seluruh lapisan masyarakat. Pentingnya jaminan sosial tersebut terkandung dalam ajaran-ajaran Al-Quran yang mengatakan bahwa:

- a. Manfaat sumber-sumber alam harus dapat dinikmati oleh semua makhluk Allah (Q.s. al-An'am : 38, al-Rahman : 10);
- b. Kehidupan fakir miskin harus diperhatikan oleh masyarakat terutama oleh mereka yang punya (Q.s. al-Dzariyat : 19, al-Ma'arij : 24);
- c. Kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya berputar di antara orang-orang kaya saja.
- d. Berbuat kebajikanlah kepada masyarakat sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu (Q.s. al-Qashash : 77), antara lain dengan menyediakan sumber-sumber alam itu;
- e. Seorang Muslim yang tidak mempunyai kekayaan harus mau dan mampu menyumbangkan tenaganya untuk tujuantujuan sosial (Q.s. al-Tawbah : 79);
- f. Seseorang janganlah menyumbang untuk kepentingan sosial dan juga untuk keperluan pribadi serta keluarga sebagai unit kecil masyarakat agar dipuji oleh orang lain (Q.s. al-Tawbah : 262);
- g. Jaminan sosial itu harus diberikan sekurang-kurangnya kepada merek yang disebutkan dalam Alquran sebagai pihak-pihak yang berhak atas jaminan tersebut (Q.s. al-Baqarah : 273, al-Tawbah : 60), dan lain-lain.

Dengan melaksanakan ajaran tentang jaminan sosial di atas berarti manusia di samping telah berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah, membersihkan hartanya, dan membuang sifat riba dan tamak serta egoismenya, dan telah memberlakukan hartanya sesuai dengan ketentuan agama. Hal ini akan menciptakan kehidupan yang berkeadilan dan berkeselimbangan yang penuh dengan semangat persaudaraan dan kebersamaan.

B. Penerapan Strategi Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi Pancasila.

Asas ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar moral dari perilaku ekonomi manusia di pedesaan. Kesediaan mengendalikan diri, sikap tenggang rasa dan semangat kekeluargaan dari manusia Indonesia termasuk para pengusaha dan orang kayanya, sebenarnya cukup besar.

Diharapkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah mencakup sila ketuhanan Yang Maha Esa yaitu mempertimbangkan moral serta sifat-sifat sistem moral ekonomi di desa itu memang telah melandasi atau menjadi pedoman perilaku ekonomi perorangan, kelompok-kelompok dalam masyarakat pedesaan. Dalam hal ini, diharapkan ada semangat pembangunan ekonomi tanpa ada diskriminasi antara pemodal besar dengan modal kecil. Dengan menciptakan gotong royong serta bertaqwa Kepada Tuhan YME, NKRI harus jadi pelopor kebijakan yang Pancasilais dan menunjukkan keberpihakkannya pada pelaku usaha kecil dengan cara memberikan memprioritas kebijakan ekonomi kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di pedesaan.

Pada sila pertama aktualisasi pancasila dalam bidang ekonomi mempunyai makna diantaranya yaitu :

1. Ekonomi pancasila dikendalikan oleh kaidah – kaidah moral dan etika sehingga pembangunan dapat meningkat akhlak warga negara.
2. Hasil pembangunan ekonomi sebagai hasil usaha bersama yang dapat menciptakan terwujudnya nilai – nilai Ketuhanan YME.
3. Demokrasi ekonomi merupakan bentuk ekonomi sosialis religius.

Pada pokoknya Ekonomi Pancasila adalah suatu konsep kebijaksanaan ekonomi, setelah mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan, hingga mencapai titik keseimbangan. Kekanan artinya bebas mengikuti aturan pasar, sedangkan ke kiri artinya mengalami intervensi negara dalam bentuk perencanaan memusat. Secara sederhana Ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau ekonomi pasar terkendali. Mungkin ada istilah-istilah lain yang mendekati pengertian Ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi campuran maksudnya campuran antara sistem kapitalisme dan sosialisme atau sistem ekonomi jalan ketiga.

Tetapi kedua istilah itu banyak variasinya di dunia. Sistem ekonomi yang berlaku di Amerika Utara dan Eropa Barat umpamanya, dapat disebut sebagai sistem ekonomi campuran, karena sudah tidak asli kapitalis, tetapi bukan pula sosialis. Tapi persepsi umum menilai bahwa sistem ekonomi AS adalah sebuah model ekonomi kapitalis yang paling representatif, sedangkan sistem ekonomi di Uni Soviet (dulu sampai 1991) atau RRC adalah model ekonomi sosialis yang paling baku. Barangkali yang lebih mendekati model ekonomi campuran adalah sistem ekonomi Inggris atau negara-negara Eropa Barat yang lazim disebut juga sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*).

Jika salah satu wajah ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi rakyat yang dijumpai di daerah-daerah, di perdesaan dan kota-kota kecil maupun kampung-kampung serta kota-kota besar di Indonesia (disitu banyak dijumpai industri rakyat atau kerajinan rakyat). Menurut Johan Galtung ekonomi ini bercirikan kolektifisme dimana berlaku kepemilikan kolektif atas faktor produksi yang menghasilkan produk kolektif maupun individual. Dalam distribusi ekonomi ini bertumpu pada pasar lokal, rencana lokal dan pertukaran. Ini sebenarnya adalah gambaran dari sebuah ekonomi tradisional. Jika ini gambaran maka perekonomian Indonesia tidak hanya bercorak lokal tetapi juga antar- regional, nasional bahkan internasional. Hasil perkebunan rakyat sejak berabad-abad yang lalu menjangkau pasar internasional dan itulah yang memancing kolonialisme Barat sehingga Ekonomi Kerakyatan harus dibentuk.

Ekonomi lokal ini juga sudah bersentuhan dengan modernitas yang mengandung inovasi. Sebagai perekonomian rakyat yang telah mengalami modernisasi, perekonomian rakyat pada dasarnya adalah perekonomian pasar yang didasarkan pada sistem kepemilikan individu dan kolektif. Sebagai ekonomi yang mengandung unsur pasar dan modal, maka pengertian pasar disini sudah mengalami perubahan, terutama karena pengaruh teori Keynes, yaitu pasar terkendali atau pasar berkeadilan. Konsep modalpun juga telah berkembang bukan hanya berupa modal finansial dan modal manusia (*human capital*), tetapi juga bentuk-bentuk modal lainnya yang diketemukan dalam ilmu-ilmu sosial, yaitu modal sosial (*nilai-nilai keutamaan*), modal kultural (*kreativitas dan estetika*), modal intelektual (*teknologi dan informasi*) dan modal spiritual (*keyakinan dan semangat*). Modal-modal baru ini telah membebaskan ekonomi dari sistem kapitalis yang hanya mengenal modal finansial saja.

Ekonomi Pancasila disebut juga sebagai ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, kegotong-royongan dan kerjasama. Ini adalah nilai-nilai tradisional yang bersumber pada budaya Indonesia. Tapi asas kekeluargaan ini, yang berdasarkan kepada solidaritas mekanis, telah ditransformasikan menjadi solidaritas fungsional, dengan nilai-nilai individualita dalam lembaga koperasi. Maka hal ini tergolong dalam ciri khas Ekonomi Pancasila. Lagi pula, sistem koperasi yang dibawa oleh Hatta, dipelajarinya ketika ia berkunjung ke negara-negara Skandinavia pada tahun 1926 bersama-sama dengan Dr. Samsi. Selain itu, pasal 33 UUD 1945, menyebutkan bahwa cabang-cabang penting kebutuhan rakyat dikuasai oleh negara, sehingga melahirkan BUMN. Jika ini juga ciri Ekonomi Pancasila, maka Ekonomi Pancasila mengikuti model negara kesejahteraan Eropa Barat.

Masalah selanjutnya yang dihadapi dalam pengembangan Ekonomi Pancasila adalah masalah epistemologis yang menyangkut metode pemahaman dan praktek pengembangan

Ekonomi Pancasila. Bahwa konsep manusia dalam Ekonomi Pancasila, lebih merupakan homo-socius dan homo-ethicus atau homo-religious. Dewasa ini sudah lebih banyak ditulis teori mengenai manusia yang menghasilkan manusia-multidimensi yang kompleks. Masalahnya sekarang adalah apakah temuan-temuan baru mengenai teori manusia itu mempengaruhi konsep Ekonomi Pancasila?

Secara epistemologis Ekonomi Pancasila perlu digambarkan dalam sebuah deskripsi dan analisis mengenai Sistem Ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang disusun berdasarkan UUD 1945, termasuk Pancasila, khususnya berpedoman pada pasal 33. Sokoguru sistem ekonomi ini adalah koperasi, khususnya model koperasi negara- negara Nordic yang sudah cukup baku, baik dari aspek makro maupun mikro. Tapi koperasi Indonesia adalah koperasi yang dibentuk di atas perekonomian rakyat yang terdiri dari usaha keluarga (usaha mikro), usaha kecil dan menengah, sebagaimana pernah digambarkan oleh Bung Hatta.

Secara aksiologis Ekonomi Pancasila perlu ditegaskan sebagai perekonomian yang bertujuan untuk menyelesaikan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan ketimpangan, kesenjangan, eksploitasi dan ketergantungan, melalui partisipasi rakyat dalam kegiatan ekonomi sehingga tercapai suatu kondisi masyarakat yang beradilan atau masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila maupun strategi ekonomi Islami. Karena itu rumusan normatif mengenai Ekonomi Pancasila perlu disusun. Sebagaimana dikatakan oleh Bung Hatta, kita harus selalu ingat kepada pedoman normatif dalam kegiatan ekonomi, yaitu Pancasila yang perlu ditafsirkan secara sosial- ekonomi maupun Sosial-religius..

Pada dasarnya sistem ataupun konsep ekonomi yang sudah dijelaskan diatas memperkuat bahwa Ekonomi Pancasila sebagai strategi Ekonomi islami yang sudah dijelaskan. Seperti halnya koperasi, gotong royong, kepedulian sesama dalam masyarakat menimbulkan suatu konsep pancasilais dalam bernegara di wilayah ekonomi perdesaan yang berfokus pada kepercayaan religius di wilayah Kp. Pulumurub Ds Sukawijaya Kec. Tambelang Kab. Bekasi sudah ada hal hal yang menjurus demikian.

C. Penerapan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Pembangunan Sistem Ekonomi Kerakyatan (Ekonomi Pancasila) Di Desa Sukawijaya Kecamatan Tambelang.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara global kita mengenal beberapa sistem ekonomi yang menjadi sebuah pijakan untuk menjalankan roda ekonomi. Ada sistem ekonomi pasar yang diterapkan oleh negara-negara yang menganut ideologi liberal, dan sistem ekonomi komando yang diterapkan oleh negara-negara yang menganut ideologi komunis serta sistem ekonomi campuran seperti yang diterapkan di Inggris dan Jerman. Indonesia sebagai negara yang menganut ideologi Pancasila, serta menganut pula sistem ekonomi Pancasila maka akan menerapkan nilai- nilai ekonomi yang di amanatkan oleh Pancasila.

Sistem ekonomi kekeluargaan atau kelembagaan yang diamanatkan oleh Pancasila adalah sistem ekonomi kekeluargaan, penjelasannya sistem ekonomi kapitalis yang mengabsahkan penindasan kepada yang lemah, eksploitasi, individualisme. Sedangkan sistem ekonomi kekeluargaan tidak ada penindasan. Semuanya diatur secara keluarga pastinya hal-hal yang bersifat musyawarah dan mufakat yang tentunya sudah di jabarkan dalam pasal 33. Sistem ekonomi kekeluargaan juga dapat diartikan membangun perekonomian secara mandiri dengan pengertian tidak diperbolehkan menggantungkan pada asing atau biasa di sebut ekonomi kerakyatan. (Pancasila sebagai cita-cita dan UUD 1945 sebagai cara untuk mencapai cita-cita tersebut) oleh karena itu Pancasila harus jadi acuan pasal- pasal UUD 1945.

Nilai-nilai yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan ekonomi di pedesaan diantaranya adalah:

1. Distribusi pendapatan dalam suatu kegiatan usaha sesuai dengan hak dan kewajiban serta kedudukan masing-masing.
2. Membantu pekerjaan yang lemah baik melalui bimbingan keterampilan maupun dalam bentuk material.
3. Warga negara dituntut gemar memberikan sebagian rizkynya kepada orang lain.
4. Mengakui bahwa keberhasilan suatu usaha atas kerja semua pihak.
5. Saling menghormati rekan kerja serta menjamin hubungan baik antara orang-orang yang terlibat dalam komunitas produsen dan konsumen.

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi untuk pembangunan sistem Ekonomi Kerakyatan (Ekonomi Pancasila) di pedesaan sudah bisa dilaksanakan dengan baik asalkan semua pihak, masyarakat beserta semua elemen pemerintah dan swasta ikut serta menerapkan konsep ekonomi kerakyatan demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara Demografis Kampung Pulomurub Desa Sukawijaya Kecamatan Tambelang terletak di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Sebagai daerah penyangga ibukota. Kabupaten Bekasi masih mempunyai banyak potensi yang dapat dikembangkan secara maksimal seperti kondisi wilayah yang bervariasi yaitu pesisir pantai, dataran rendah serta dataran tinggi. Masing-masing wilayah ini pastinya mempunyai komoditas ekonomi yang beragam yaitu wisata pantai dan hasil laut didaerah pesisir, pusat perdagangan dan pusat perkotaan baik itu wilayah industri maupun wilayah pedesaan dengan hamparan persawahan didaerah dataran rendah serta hasil perkebunan dan wisata alam didaerah dataran tinggi maupun wisata religius. seharusnya ini menjadi modal penting dalam perluasan lapangan pekerjaan serta sistem perekonomian kepancasilaan dimasing-masing wilayah yang tentunya perlu dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah serta peran Masyarakat di daerah tersebut.

Daerah Desa Sukawijaya berada dalam dataran rendah yang mana komoditi Persawahan dan Perikanan masih menjadi pendapatan desa ini, di Kp Pulomurub masih menjunjung tinggi nilai-nilai religius atau Islami, dikarenakan masyarakatnya masih mempunyai darah keturunan di Banten. Tidak hanya itu di daerah ini masih banyak pendidikan islami yang berupa pondok pesantren, Boarding School, Pesantren Salafiyah, maupun lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan seperti pengajian Al-Quran di musallah maupun di surau, pengajian kitab dan hadit di tokoh masyarakat atau pendidikan di sekolah formal yang berupa Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Daerah ini masih terkenal dengan desa atau kampung santri dikarenakan banyak tokoh islam kondang yang lahir dan menjadi pahlawan penyebaran islam di kabupaten Bekasi.

Semangat nasionalisme di bidang ekonomi selalu menjiwai masyarakat Kp. Pulomurub Ds Sukawijaya Kec. Tambelang Kab. Bekasi. apabila terlihat menyurut semangat ini, disebabkan oleh unsur-unsur maupun pengaruh luar yang labat laun akan masuk. Maka, kita harus bisa menganalisis setiap kasus kebijakan ekonomi yang hendak diambil oleh pemerintah desa, apakah akan menyumbang atau tidak pada peningkatan ketangguhan atau ketahanan ekonomi di daerah. Misalnya secara lebih spesifik, setiap masuk Bank Perkereditan atau kerjasama ekonomi antar lembaga ekonomi lain bisa menyumbang atau malah sebaliknya mengancam ketangguhan dan ketahanan ekonomi pada desa tersebut.

Dalam kaitannya dengan pasar bebas atau free market bukan karena kita tidak mampu bersaing dengan permasalahan tersebut. Perlu diperhatikan juga upaya pemerintah untuk memproteksi permasalahan pasar bebas. Jangan sampai di persaingkan secara langsung tentu dengan tidak adanya persiapan yang cukup kita tidak bisa bersaing dengan pengaruh dari luar.

Gotong-royong di wilayah masyarakat pedesaan tepatnya Kp. Pulomurub Ds Sukawijaya Kec. Tambelang Kab. Bekasi mengendap dalam diri masyarakat dan elemen bangsa ini secara turun temurun dan kebudayaan timur. Karakteristik gotong-royong adalah kebersamaan bukan individu, individu tumbuh sejalan dengan atmosfer globalisasi. Tujuan dari globalisasi antara lain menguasai bangsa Indonesia dengan IPTEK, semua negara yang menerima IPTEK harus punya daya saing. Globalisasi menganut pasar bebas, lemahnya daya saing akan membuat bangsa ini mudah di kuasai, kemudian globalisasi juga mendorong kepada ideologi dan konstitusi yang bersifat neoliberal. Salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya nilai-nilai Pancasila dalam hal ini gotong-royong adalah karena pengaruh globalisasi yang mau tidak mau membawa kita dalam pusaran pasar bebas, dengan adanya pasar bebas tentu dalam hal kebijakan ekonomi para pelaku usaha kecil menengah (UKM) perlu mendapatkan proteksi dari pemerintah.

Dalam halnya Zakat di sini terdapat amil zakat maupun zakat yang di kumpulkan di Masjid Jami untuk kepentingan masyarakat setempat, sedangkan dalam pelarangan riba memang perlu untuk peran serta kepala desa maupun pemerintah terkait yang mana di sini dengan membuat himbawan secara tertulis, kerjasama ekonomi yang berupa koperasi dan lainnya, serta jaminan sosial yang menjadi program bersama di Indonesia.

Dalam rangka penguatan ekonomi pancasila di pedesaan dalam mengembangkan usaha menengah menjadi usaha besar, usaha kecil menjadi usaha menengah, dan usaha mikro menjadi usaha kecil, salah satu kendala yang dihadapi adalah modal untuk investasi dan modal untuk kerja. Kemerataan sosial dalam bidang ekonomi di Kp. Pulomurub Ds Sukawijaya Kec. Tambelang Kab. Bekasi terlihat dari adanya pada UKM yang akhirnya membentuk Koperasi sebagai bagian dari usaha bersama, ini relevan dengan point koperasi sebagai sokoguru perekonomian. Meskipun adanya koperasi ini masih inisiatif dari para pelaku usaha itu sendiri bukan dari pemerintah, harusnya pemerintah pun bersedia memberikan stimulasi kepada koperasi para pelaku usaha ini.

Karena jangkauan pasar yang masih terbatas, teknologi yang digunakan belum efisien, dan manajemen usaha yang belum efisien, maka resiko kegagalannya cukup tinggi. Tingginya resiko gagal menyebabkan resiko investasinya juga besar. Tingginya resiko investasi dan rendahnya pemilikan collateral, menyebabkan lembaga keuangan bank kurang berminat memberi pinjaman kepada UKM ataupun UMKM atau lembaga perekonomian lainnya.

Jumlah dana yang diberikan bank kepada UKM jauh dibawah tingkat permintaan UKM, UMKM atau lembaga perekonomian lainnya. Kekurangan pasokan ini selanjutnya diisi oleh lembaga kredit non bank, seperti KOSIPA (Koperasi Simpan Pinjam), dan pengijon (orang yang membeli padi dan sebagainya dengan cara ijon), dengan tingkat bunga jauh di atas tingkat bunga pasar. Intervensi pemerintah, melalui dana bantuan langsung ke masyarakat, seperti dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Inpres Desa Tertinggal (IDT), dan program sejenis, ternyata kurang efektif dan kurang efisien.

Seperti yang dijelaskan diatas, adanya inisiatif dari para pelaku usaha dari beberapa klaster lembaga perekonomian di Kp. Pulomurub Ds Sukawijaya Kec. Tambelang Kab. Bekasi yang telah sadar secara bersama-sama bersepakat untuk membuat koperasi sebagai wadah permodalan bagi rumpun usaha yang mereka geluti. Sebagai contoh lembaga perekonomian Gapoktan dan UMKM di masyarakat yang menjadi pelopor pembentukan koperasi meskipun koperasi ini tidak hanya ada di Kp. Pulomurub Ds Sukawijaya Kec. Tambelang Kab. Bekasi saja, namun semangat ini yang akhirnya menginspirasi lembaga perekonomian lain untuk membentuk koperasi. Kelembagaan keuangan mikro (micro finance) yang terbentuk dari program-program dimaksud, tingkat keberlanjutannya rendah, dan hampir tidak mampu memecahkan permasalahan tingkat suku bunga yang tinggi. Selain itu juga banyak menimbulkan ketergantungan kepada pemerintah dan membutuhkan biaya delivery yang

tinggi. Dari Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa ini membuat masyarakat, pemerintah daerah maupun seluruh pihak terkait di Kp. Pulumurub Desa Sukawijaya Kecamatan Tambelang menjunjung Strategi Ekonomi Islami dalam upaya kesejahteraan masyarakat demi terciptanya suatu sistem ekonomi yang Pancasila di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembahasan

Strategi Ekonomi Islam merupakan hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat karena sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang meliputi adanya zakat untuk menciptakan keadilan sosial, adanya larangan riba karena suku bunga yang diterapkan kepada nasabah akan memicu peningkatan inflasi secara makro, adanya kerjasama ekonomi yang tercermin melalui budaya gotong royong dimana yang kuat membantu yang lemah, serta adanya jaminan sosial untuk memenuhi kualitas hidup minimum bagi seluruh lapisan masyarakat. Strategi Ekonomi Islam dapat dikombinasikan dengan sistem ekonomi Pancasila karena keduanya memiliki kesamaan yaitu mengikuti kaidah modal dan etika, bercirikan kolektifisme, dan mencerminkan bentuk ekonomi sosialis religius. Penerapan nilai sila pertama Pancasila dalam pembangunan sistem Ekonomi Kerakyatan (Ekonomi Pancasila) di desa Sukawijaya kec, Tambelang mendukung upaya kesejahteraan masyarakat demi terciptanya suatu sistem ekonomi yang Pancasila di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kesimpulan

Sistem ekonomi yang sesuai dengan amanat Pancasila adalah sistem ekonomi kekeluargaan, atau sistem ekonomi kerakyatan (ekonomi Pancasila) dan ada pula yang menyebutnya sistem ekonomi kelembagaan. Merupakan sistem ekonomi yang mengabsahkan nilai-nilai kekeluargaan yang bersifat musyawarah mufakat seperti yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Pancasila adalah cita-cita, sedangkan UUD 1945 adalah sebuah cara untuk mencapai cita-cita yang ada dalam Pancasila, oleh karena itu Pancasila harus jadi acuan pasal-pasal pada UUD 1945 serta undang-undang dibawahnya.

Strategi dalam perekonomian religius atau Islami adalah strategi ekonomi tersendiri, bukan merupakan perpaduan dan atau campuran antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Strategi ekonomi Islam menempatkan manusia bukanlah sebagai sentral (anthroposentrism) tetapi sebagai hamba Tuhan (abid) yang harus mengabdikan dan mengemban tugas yang dipercayakan-Nya sebagai hamba (khalifah). Untuk itu, dalam kegiatan ekonomi harus menjunjung tinggi nilai-nilai kepemilikan, nilai-nilai keadilan, kebebasan, keseimbangan, dan persaudaraan serta kebersamaan sesuai dengan tuntunan ajaran agama agar tercipta sebuah tatanan hidup pribadi dan bermasyarakat serta bernegara yang baik sehingga bagaimana penerapan Strategi Ekonomi Islam ini saling bersinergi dengan Sistem Ekonomi Pancasila .

Untuk itu, strategi Ekonomi Islam telah meletakkan basis-basis kebijakannya di batang tubuh sila pertama Pancasila berupa:

- a. perintah membayar zakat kepada orang-orang yang mampu untuk para mustahiq;
- b. melarang praktik-praktik riba (eksploitasi);
- c. memberikan jaminan sosial kepada orang yang berhak menerimanya;
- d. mendorong terciptanya kerjasama ekonomi antara individu, masyarakat, dan antar negara;
- e. memfungsikan lembaga pemerintah untuk menjadi polisi sehingga sinergi para pelaku pasar akan dapat mewujudkan kemakmuran, keamanan, dan keadilan di masyarakat.

Masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Kp. Pulomurub Desa Sukawijaya Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi khususnya mempunyai asas Gotong Royong yang dilandaskan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa strategi ekonomi Islami sudah terlaksana dengan baik. Cuma memang belum maksimal maka harus ada realisasi bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat dengan sistem ekonomi Pancasila dengan pengimplementasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintahnya untuk setiap daerah pedesaan.

Dalam konteks memaksimalkan strategi ekonomi Islam di Indonesia kedepan diperlukan penguatan juga terhadap nilai-nilai Pancasila yang merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem Perekonomian Indonesia. Pengabaian terhadap nilai-nilai ekonomi Pancasila tidak akan pernah memecahkan persoalan dan permasalahan ekonomi di wilayah Pedesaan secara komprehensif dari semua segi perekonomian. Perbaikan pada salah satu kebijakan dan Lembaga perekonomian serta peran aktif seluruh elemen masyarakat dan pemerintah demi terserapnya nilai-nilai Pancasila dalam sistem perekonomian kerakyatan dalam kehidupan bernegara.

Daftar Pustaka

- Abbas, Anwar, Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-nilai Dasar, dan Instrumental, (Harian Kompas, 15 September 1992)
- Ali, Mohammad Daud, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI Press, 1998), Cet. I Anto, MB. Hendri, Pengantar Ekonomi Mikro Islami, (Yogyakarta: Penerbit Ekonomi, 2003), Cet. I,
- Asshiddiqie, Jimly, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Dawam Rahardjo, Presiden dari The International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT-Indonesia), Anggota Komisi Khusus Kajian Ekonomi Pancasila. Pada tanggal 6 Januari 2004.
- Galtung, Johan, "Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization", Oslo, 1996 (diterjemahkan sebagai "Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban, Jakarta, 2003)
- Kuncoro, Mudrajad, Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif, (Jakarta: Erlangga, 2006) Manullang, A.C, 1986, Pilar-Pilar Pancasila, Setia Sakti, Jakarta.
- Manullang, A.C, 1986, Pilar-Pilar Pancasila, Setia Sakti, Jakarta.
- MB. Hendri Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islami, (Yogyakarta: Penerbit Ekonomi, 2003), Cet. I
- Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT. Remaja Rosda Karya. 2002 Mubyarto, 1987, Ekonomi Pancasila : gagasan dan kemungkinan, LP3ES, Jakarta.
- Mubyarto, 1987, Ekonomi Pancasila : gagasan dan kemungkinan, LP3ES, Jakarta.
- Rahardjo, Dawam, Presiden dari The International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT-Indonesia), Anggota Komisi Khusus Kajian Ekonomi Pancasila. Pada tanggal 6 Januari 2004.
- Supriyanto, Eko Eddy, penerapan nilai – nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi di Kabupaten Tegal 2009 – 2014 Vol 4, No.1 (2013) : Politika Jurnal Ilmu Politik.
- Soekarno, Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid Pertama, Cetakan Ketiga, Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1964.
- Sondang, Siagian P. Manajemen Strategi, (bumi aksara, Jakarta, 2004)

ISSN XXXX-XXXX

Prosiding EMAS: Ekonomi Manajemen Akuntansi Kewirausahaan Vol.1 No.1 - Juni 2021

Call for Papers dan Seminar I “Manajemen dan Ekonomi Berbasis Pancasila”

Magister Manajemen, Universitas Pelita Bangsa, 26 Juni 2021

Swasono, Sri Edi, Kebangsaan, Kerakyatan, dan Kebudayaan dalam “Prosiding Kongres Pancasila VI: Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi, Integrasi Pelembagaan dan Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Memperkokoh Kedaulatan Bangsa”, Ambon, 31 Mei - 01 Juni 2014.

Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Jakarta.Kencana. 2010

Undang-undang RI No. 20 / 2003 tentang Sisdiknas.